



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENYUSUNAN RENCANA MUTU UNIT KERJA (RMU)  
SOP/UPM/DJBM-60 Rev:01**

**TAHUN 2022**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110

Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN RENCANA MUTU UNIT KERJA (RMU)

SOP/UPM/DJBM-60 Rev:01

Disahkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2022

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

HEDY RAHADIAN

Nomor Salinan

Status Dokumen



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Rencana Mutu Unit Kerja (RMU)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-60  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 30 September 2022  
Tgl. Kaji Ulang : September 2027

Hal : ii dari vi  
Paraf :

### DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
LEMBAR DISTRIBUSI.....	iii
SEJARAH DOKUMEN.....	v
1. Ruang Lingkup .....	1
2. Maksud dan Tujuan .....	1
3. Acuan .....	1
4. Istilah dan Definisi .....	2
5. Ketentuan Umum.....	3
6. Tahapan Kegiatan .....	5
a. Identitas SOP .....	5
b. Bagan Alir Kegiatan.....	7
c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan .....	8
d. Wewenang dan Tanggung Jawab .....	9
7. Kondisi Khusus.....	9
8. Bukti Kerja .....	9
9. Lampiran .....	10



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Rencana Mutu Unit Kerja (RMU)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-60  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 30 September 2022  
Tgl. Kaji Ulang : September 2027

Hal : iii dari vi  
Paraf :

### LEMBAR DISTRIBUSI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
	<b>Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga</b>	
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Bs
002	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Bp
003	Direktorat Pembangunan Jalan	Bg
004	Direktorat Pembangunan Jembatan	Bt
005	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Bn
006	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	Br
007	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Bk
008	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Be
009	Direktorat Kepatuhan Intern	Bi
	<b>Unit Kerja Badan Pengatur Jalan Tol</b>	
010	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Ts
	<b>Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional</b>	
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Bb2
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	Bb5
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat	Bb6
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta	Bb7
015	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali	Bb8
016	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur	Bb12
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan	Bb13
	<b>Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional</b>	
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh	Bb1
019	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	Bb3
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi	Bb4
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat	Bb9
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur	Bb10
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan	Bb11
024	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah	Bb14

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Penyusunan Rencana Mutu Unit Kerja (RMU)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-60  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 30 September 2022  
Tgl. Kaji Ulang : September 2027

Hal : iv dari vi  
Paraf :

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
025	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara	Bb15
026	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku	Bb16
027	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat	Bb17
028	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura	Bb18
029	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung	Bb19
030	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat	Bb20
031	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara	Bb21
032	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke	Bb22
033	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau	Bb23
034	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau	Bb24
035	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu	Bb25
036	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung	Bb26
037	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten	Bb27
038	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara	Bb28
039	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah	Bb29
040	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	Bb30
041	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat	Bb31
042	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara	Bb32
043	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena	Bb33
	<b>Unit Kerja Balai Teknik</b>	
044	Balai Bahan Jalan	Bb34
045	Balai Jembatan	Bb35
046	Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur	Bb36
047	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bb37

#### Catatan:

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, dan Balai Teknik dan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada di bawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Penyusunan Rencana Mutu Unit Kerja (RMU)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-60  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 30 September 2022  
Tgl. Kaji Ulang : September 2027

Hal : v dari vi  
Paraf :

#### SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN
September 2022	Prosedur direvisi pada:  1. Maksud dan Tujuan   2. Acuan	<p>Perubahan pada tata penulisan, maksud dan tujuan dipisahkan menjadi 2 paragraf berbeda.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penambahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pengganti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.</li><li>• Penggunaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Pengganti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020.</li><li>• Penggunaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 Pengganti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015.</li><li>• Penambahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2018 Tahun 2018.</li><li>• Penambahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021.</li></ul>

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Penyusunan Rencana Mutu Unit Kerja (RMU)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-60  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 30 September 2022  
Tgl. Kaji Ulang : September 2027

Hal : vi dari vi  
Paraf :

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Penambahan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021.</li></ul>

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Rencana Mutu Unit Kerja (RMU)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-60  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 30 September 2022  
Tgl. Kaji Ulang : September 2027

Hal : 1 dari 29  
Paraf :

### 1. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur ini meliputi kegiatan pengumpulan data rencana kerja tahunan yang terdiri atas sasaran pelaksanaan kegiatan, rincian rencana kegiatan, rencana jadwal pelaksanaan kegiatan dan rencana rapat koordinasi berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan kertas kerja Satuan Kerja (Satker).

### 2. Maksud dan Tujuan

Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan agar dalam penyusunan Rencana Mutu Unit Kerja dapat menjamin mutu kegiatan/hasil pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan untuk memberikan panduan tata cara pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Mutu Unit Kerja (RMU) agar tercapai kesamaan dan keseragaman pelaksanaan kegiatan serta sesuai dengan ketentuan dan persyaratan.

### 3. Acuan

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554).
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473).

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat





## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Penyusunan Rencana Mutu Unit Kerja (RMU)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-60  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 30 September 2022  
Tgl. Kaji Ulang : September 2027

Hal : 2 dari 29  
Paraf :

- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121).
- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286).
- f. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593).

#### 4. Istilah dan Definisi

- a. Kebijakan Mutu merupakan dasar komitmen untuk menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- b. Manual Mutu adalah dokumen mutu ditingkat Unit Kerja Eselon I yang diperlukan untuk mengatur penerapan SMM di lingkungan unit kerjanya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Sasaran Mutu merupakan target yang harus dicapai sebagai penjamin mutu kegiatan dan ditetapkan oleh manajemen puncak setiap Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan/dan tidak bertentangan dengan Visi dan Misi Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan.
- d. Prosedur Mutu adalah dokumen wajib yang menjelaskan metode dan tindakan tertentu yang dipersyaratkan dalam SMM dan wajib dilaksanakan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- e. Rencana Mutu Unit merupakan dokumen rencana penetapan kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program tahunan berkenaan yang disusun oleh Unit Kerja Eselon I sampai dengan Eselon II dalam rangka menjamin mutu.
- f. Petunjuk Pelaksanaan merupakan dokumen standar kerja yang dibutuhkan oleh setiap Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses dilakukan secara efektif sesuai SMM.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Penyusunan Rencana Mutu Unit Kerja (RMU)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-60  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 30 September 2022  
Tgl. Kaji Ulang : September 2027

Hal : 3 dari 29  
Paraf :

- g. Perjanjian Kerja merupakan komitmen tercapainya kinerja *output* dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Marga setelah adanya alokasi anggaran DIPa.

#### 5. Ketentuan Umum

a. Kewajiban Penyusunan RMU

RMU disusun setiap awal Tahun Anggaran dan setelah diterimanya DIPa dan Kertas Kerja Satker.

b. Pengumpulan Dokumen Sumber Penyusunan RMU

Pengumpulan dokumen sumber penyusunan RMU mencakup antara lain:

- 1) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPa), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
- 2) Dokumen Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Perjanjian Kinerja;
- 3) Laporan Alokasi dan Rencana Anggaran per PPK, Rincian Pekerjaan Per Satuan Kerja Tahun Anggaran Berkenaan Direktorat/Balai Besar/Balai, Rangkuman setiap PPK (Rincian Paket Kegiatan APBN dan Revisinya, Tahun Anggaran Berkenaan) pada Satuan Kerja Direktorat/Balai Besar/Balai.

c. Penyusunan Rencana Mutu Unit

Setelah semua dokumen sumber penyusunan Rencana Mutu Unit terkumpul, Sub Direktorat/Bidang/Seksi Terkait menyusun *Draft* Rencana Mutu Unit yang memiliki isi sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan;
- 2) Maksud dan Tujuan;
- 3) Ruang Lingkup Penerapan;
- 4) Referensi;
- 5) Sasaran Pelaksanaan Kegiatan yang Akan Diselenggarakan;
- 6) Rincian Rencana Kegiatan yang Akan Diselenggarakan;
- 7) Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan yang Akan Diselenggarakan;
- 8) Rencana Rapat Koordinasi.

d. Kegunaan Rapat Koordinasi

Rapat Koordinasi dengan Unit Kerja di lingkungan Direktorat/Balai Besar/Balai untuk melihat progres secara keseluruhan. Rapat Koordinasi, pelaksanaannya



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Penyusunan Rencana Mutu Unit Kerja (RMU)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-60  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 30 September 2022  
Tgl. Kaji Ulang : September 2027

Hal : 4 dari 29  
Paraf :

disesuaikan dengan penyelenggaraan Rapat Koordinasi yang berlaku di masing-masing Unit Kerja.

Rapat Koordinasi digunakan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menilai pencapaian secara kuantitatif dan kualitatif dari pelaksanaan kegiatan terhadap sasaran dan program yang telah ditentukan dalam program kerja Eselon I;
- 2) Menjadi alat pengukuran pada hasil keluaran kegiatan terhadap *output*, *outcome* dan manfaat yang telah ditetapkan dalam sasaran dan program;
- 3) Menjadi dasar perbaikan untuk peningkatan kinerja di masing-masing unit kerja dalam melaksanakan program-program rencana kerja pembangunan jangka panjang, rencana kerja pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja pembangunan tahunan yang mengacu kepada Rencana Strategi (RENSTRA).

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Penyusunan Rencana Mutu Unit Kerja (RMU)


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-60  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 30 September 2022  
Tgl. Kaji Ulang : September 2027

Hal : 5 dari 29  
Paraf :

#### 6. Tahapan Kegiatan

##### a. Identitas SOP

 <b>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</b>	<b>NOMOR SOP</b>	SOP/UPM/DJBM-60 Rev:01
	<b>TGL. PEMBUATAN</b>	30 September 2022
	<b>TGL. REVISI</b>	
	<b>TGL. EFEKTIF</b>	
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,  HEDY RAHADIAN
	<b>NAMA SOP</b>	Penyusunan Rencana Mutu Unit Kerja (RMU)
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63). b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554). c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473). d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121). e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286). f. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593).	1. Memahami Mekanisme Penyusunan Rencana Mutu Unit Kerja (RMU) 2. Memahami isi substansi SOP yang disusun	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>	
-	-	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Penyusunan Rencana Mutu Unit Kerja (RMU)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-60  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 30 September 2022  
Tgl. Kaji Ulang : September 2027

Hal : 6 dari 29  
Paraf :

#### PERINGATAN

Apabila SOP Penyusunan Rencana Mutu Unit Kerja (RMU) ini tidak diacu maka Penyusunan Rencana Mutu Unit Kerja (RMU) yang dilaksanakan tidak memenuhi syarat formal Penyusunan Rencana Mutu Unit Kerja (RMU) yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga

#### PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Penyusunan Rencana Mutu Unit Kerja (RMU)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-60  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 30 September 2022  
Tgl. Kaji Ulang : September 2027

Hal : 7 dari 29  
Paraf :

#### b. Bagan Alir Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Sub Direktorat/Bagian/Bidang/Seksi Terkait	Sekretaris Manajemen Unit Kerja Direktorat/Balai Besar/Balai	Direktur/Kepala Balai	Kelengkapan	Waktu	Output
	Mulai						
1	Pengumpulan Dokumen Sumber Penyusunan RMU				1. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) 2. DIPA Tahun Berkenaan 3. Petunjuk Operasional 4. Rencana Kinerja Tahunan 5. Perjanjian Kinerja 6. Data Sumber Daya: - Manusia - Sarana Prasarana - Informasi dan Teknologi - Finansial - Metode Pelaksanaan	3 hari	Draf Dokumen RMU
2	Memasukan Sasaran Pelaksanaan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan				Sasaran Pelaksanaan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan	3 hari	Draf Dokumen RMU
3	Memasukan Rincian Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan				Rincian Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan	3 hari	Draf Dokumen RMU
4	Menyusun Rencana Jadwal Pelaksanaan Program yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan				1. Sasaran Pelaksanaan Kegiatan 2. Rincian Program Kegiatan	2 hari	Draf Dokumen RMU
5	Melaksanakan Rapat Koordinasi				Draf Dokumen RMU	2 hari	1. Dokumen RMU 2. Notulensi Hasil Rapat
6	Melakukan Finalisasi Dokumen Rencana Mutu Unit				1. Dokumen RMU 2. Notulensi Hasil Rapat	1 hari	Dokumen RMU
7	Mengesahkan Dokumen Rencana Mutu Unit				Dokumen RMU	1 hari	Rencana Mutu Unit
	Selesai						

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Penyusunan Rencana Mutu Unit Kerja (RMU)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-60  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 30 September 2022  
Tgl. Kaji Ulang : September 2027

Hal : 8 dari 29  
Paraf :

#### c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan

- 1) Sub Direktorat/Bagian/Bidang/Seksi Terkait mengumpulkan Dokumen Sumber Penyusunan RMU.

Dalam rangka penyusunan RMU pada Direktorat/Balai Besar/Balai, maka Sub Direktorat/Bidang/Seksi terkait melaksanakan kegiatan yang mencakup antara lain:

##### a) Pengumpulan dokumen:

- i) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
- ii) Dokumen Rencana Kinerja Tahunan, Dokumen Penetapan Kinerja, Dokumen Perjanjian kinerja.

- b) Laporan Alokasi dan Realisasi Anggaran per PPK, Rincian Pekerjaan Per Satuan Kerja Tahun Anggaran berkenaan Direktorat/Balai Besar/Balai, Rangkuman Setiap PPK (Rincian Paket Kegiatan APBN dan Revisinya, Tahun Anggaran (Berkenaan)) pada Satuan Kerja Direktorat/Balai Besar/Balai.

- 2) Sekretaris Manajemen Unit Kerja Direktorat/Balai Besar/Balai memasukkan sasaran pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran (berkenaan).
- 3) Sekretaris Manajemen Unit Kerja Direktorat/Balai Besar/Balai memasukkan rincian rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran (berkenaan) yang berisi tentang Kegiatan, Volume dan Biaya pada DIPA Petikan ke dalam tabel yang tercantum pada Lampiran 9.d (FRM-04/SOP/UPM/DJBM-60 Rev: 00).
- 4) Sekretaris Manajemen Unit Kerja Direktorat/Balai Besar/Balai menyusun rencana jadwal pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran (berkenaan) sesuai dengan waktu 1 (satu) Tahun Anggaran, yang berisi: Nama Program, Unit Kerja Penanggung Jawab ke dalam tabel yang tercantum pada Lampiran 9.e (FRM-05/SOP/UPM/DJBM-60 Rev:00).
- 5) Sekretaris Manajemen Unit Kerja Direktorat/Balai Besar/Balai melakukan Rapat koordinasi dengan Unit Kerja di lingkungan Direktorat/Balai Besar/Balai disusun untuk melihat progres secara keseluruhan.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Penyusunan Rencana Mutu Unit Kerja (RMU)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-60  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 30 September 2022  
Tgl. Kaji Ulang : September 2027

Hal : 9 dari 29  
Paraf :

- 6) Sub Direktorat/Bagian/Bidang/Seksi Terkait melakukan finalisasi dokumen RMU.
  - 7) Direktur/Kepala Balai Besar/Kepala Balai melakukan verifikasi dan mengesahkan RMU.
- d. Wewenang dan Tanggung Jawab
- 1) Sub Direktorat/Bidang/Seksi Terkait bertanggung jawab dalam:
    - a) Pengumpulan dokumen sumber penyusunan RMU;
    - b) Melakukan finalisasi dokumen RMU.
  - 2) Sekretaris Manajemen Unit Kerja Direktorat/Balai Besar/Balai bertanggung jawab dalam:
    - a) Memasukkan sasaran pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran (berkenaan);
    - b) Memasukkan rincian program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran (berkenaan);
    - c) Menyusun rencana jadwal pelaksanaan program yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran (berkenaan);
    - d) Melakukan rapat koordinasi.
  - 3) Direktur/Kepala Balai Besar/Kepala Balai bertanggung jawab dalam melakukan verifikasi dan mengesahkan RMU.

#### 7. Kondisi Khusus

Tidak ada.

#### 8. Bukti Kerja

- a. Berita Acara Perjanjian
- b. Perjanjian Kinerja
- c. Sasaran Pelaksanaan Kegiatan Yang Akan Diselenggarakan Pada Tahun Anggaran (Berkenaan)
- d. Rincian Rencana Kegiatan Yang Akan Diselenggarakan Pada Tahun Anggaran (Berkenaan)
- e. Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Yang Akan Diselenggarakan Pada Tahun Anggaran (Berkenaan)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat





## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Penyusunan Rencana Mutu Unit Kerja (RMU)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-60  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 30 September 2022  
Tgl. Kaji Ulang : September 2027

Hal : 10 dari 29  
Paraf :

#### 9. Lampiran

- a. Berita Acara Perjanjian Kinerja  
(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-60 Rev:01)
- b. Perjanjian Kinerja  
(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-60 Rev:01)
- c. Sasaran Pelaksanaan Kegiatan Yang Akan Diselenggarakan Pada Tahun Anggaran (Berkenaan)  
(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-60 Rev:01)
- d. Rincian Rencana Kegiatan Yang Akan Diselenggarakan Pada Tahun Anggaran (Berkenaan)  
(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-60 Rev:01)
- e. Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Yang Akan Diselenggarakan Pada Tahun Anggaran (Berkenaan)  
(FRM-05/SOP/UPM/DJBM-60 Rev:01)
- f. Contoh Cara Pengisian Format Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan  
(FRM-06/SOP/UPM/DJBM-60 Rev:01)
- g. Daftar Simak Rencana Mutu Unit  
(FRM-07/SOP/UPM/DJBM-60 Rev:01)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Penyusunan Rencana Mutu Unit Kerja (RMU)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-60  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 30 September 2022  
Tgl. Kaji Ulang : September 2027

Hal : 11 dari 29  
Paraf :

#### Berita Acara Perjanjian Kinerja

(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-60 Rev:01)



#### BERITA ACARA ..... DIREKTORAT/BALAI .... – DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (Pimpinan Puncak Unit Kerja Eselon II)

Jabatan :

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : (Pimpinan Puncak Unit Kerja Eselon I)

Jabatan :

Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama pada tahun anggaran (berkenaan) ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, .....

(Pihak Kedua)

(Pihak Pertama)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Rencana Mutu Unit Kerja (RMU)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-60  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 30 September 2022  
Tgl. Kaji Ulang : September 2027

Hal : 12 dari 29  
Paraf :

### Perjanjian Kinerja

(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-60 Rev:01)



### PERJANJIAN KINERJA

Unit Kerja Eselon II : .....  
Tahun Anggaran : .....

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET

Jumlah Anggaran:  
Kegiatan.....  
.....: Rp. ....

Jakarta, .....  
Pimpinan Unit Kerja Eselon I,                      Pimpinan Unit Kerja Eselon II,

(Nama dan NIP)

(Nama dan NIP)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Penyusunan Rencana Mutu Unit Kerja (RMU)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-60  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 30 September 2022  
Tgl. Kaji Ulang : September 2027

Hal : 13 dari 29  
Paraf :

#### Sasaran Pelaksanaan Kegiatan Yang Akan Diselenggarakan Pada Tahun Anggaran (Berkenaan)

(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-60 Rev:01)



#### SASARAN PELAKSANAAN KEGIATAN YANG AKAN DISELENGGARAKAN PADA TAHUN ANGGARAN (BERKENAAN)

NO.	SASARAN	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	OUTCOME KEGIATAN
	Diisi dengan: Sasaran dalam rangka operasionalisasi program yang telah ditetapkan dalam program kerja Eselon I.	Diisi dengan: Nama kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai sasaran yang akan dicapai.	Diisi dengan: <i>Output</i> yang harus dicapai oleh kegiatan.	Diisi dengan: <i>Outcome</i> yang harus dicapai.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Penyusunan Rencana Mutu Unit Kerja (RMU)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-60  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 30 September 2022  
Tgl. Kaji Ulang : September 2027

Hal : 14 dari 29  
Paraf :

#### Rincian Rencana Kegiatan Yang Akan Diselenggarakan Pada Tahun Anggaran (Berkenaan)

(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-60 Rev:01)



#### RINCIAN RENCANA KEGIATAN YANG AKAN DISELENGGARAKAN PADA TAHUN ANGGARAN (BERKENAAN)

NO.	KEGIATAN	VOLUME	BIAYA
	Diisi dengan: Nama kegiatan disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari Unit Kerja Eselon I, untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra.	Diisi dengan: Disesuaikan dengan karakteristik kegiatannya.	Diisi dengan: Nilai rupiah sesuai dalam PO.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Penyusunan Rencana Mutu Unit Kerja (RMU)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-60  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 30 September 2022  
Tgl. Kaji Ulang : September 2027

Hal : 15 dari 29  
Paraf :

#### Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Yang Akan Diselenggarakan Pada Tahun Anggaran (Berkenaan)

(FRM-05/SOP/UPM/DJBM-60 Rev:01)



#### RENCANA JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN YANG AKAN DISELENGGARAKAN PADA TAHUN ANGGARAN (BERKENAAN)

NO.	NAMA KEGIATAN	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	TAHUN - BULAN											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Rencana Mutu Unit Kerja (RMU)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-60  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 30 September 2022  
Tgl. Kaji Ulang : September 2027

Hal : 16 dari 29  
Paraf :

### Contoh Cara Pengisian Format Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan

(FRM-06/SOP/UPM/DJBM-60 Rev:01)



### CONTOH PENGISIAN FORMAT DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN			
TAHUN ANGGARAN 2017			
NOMOR : DIPA -			
I A. INFORMASI KINERJA			
Kementerian Negara/Lembaga	:	Kuasa Pengguna Anggaran	:
Unit Organisasi	:	Bendahara Pengeluaran	:
Provinsi	:	Pejabat Penanda Tangan SPM	:
Kode/Nama Satker	:		
			Halaman : I A. 1
1 Fungsi	04	EKONOMI	
Sub Fungsi	04.08	TRANSPORTASI	90.180.545.000
2 Program	033.04.08	Program Penyelenggaraan Jalan	90.180.545.000
Hasil (Outcome)	01	Meningkatnya konektivitas jalan nasional	90.180.545.000
	02	Meningkatnya kemantapan jalan nasional	
IKU Program	01	Tingkat Konektivitas Jalan Nasional	
	02	Tingkat Kemantapan Jalan Nasional	
Kegiatan	2409	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	90.180.545.000
Indikator Kinerja Kegiatan	001	Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan	
	002	Panjang Pemeliharaan Preventif Jalan	
	003	Panjang Rehabilitasi Jalan	
	004	Panjang Rekonstruksi Jalan	
	005	Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan	
	006	Panjang Pemeliharaan Berkala Jembatan	
	007	Panjang Penggantian Jembatan	
	008	Panjang Pelebaran Jalan Menuju Standar	
	009	Panjang Pelebaran Jalan Menambah Lajur	
	010	Panjang Pembangunan Flyover/Underpass/Terowongan	
	011	Panjang Pembangunan Jalan	
	012	Panjang Pembangunan Jembatan	
	013	Panjang Duplikasi Jembatan	
	014	Panjang Pembangunan Jalan Bebas Hambatan	
	015	Panjang Dukungan Jalan Daerah	
	016	Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	
	017	Jumlah Layanan Internal (Overhead)	
	018	Bulan Layanan Perkantoran	
	019	Panjang Jalan Nasional di PKSN yang dibangun	
	020	Dilebarkannya Jalan Panji - Bts. Kab. Samosir sepanjang 5 Km	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Rencana Mutu Unit Kerja (RMU)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-60  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 30 September 2022  
Tgl. Kaji Ulang : September 2027

Hal : 17 dari 29  
Paraf :

### DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA - I A. INFORMASI KINERJA

Kementerian Negara/Lembaga :  
Unit Organisasi :  
Provinsi :  
Kode/Nama Satker :

Kuasa Pengguna Anggaran :  
Bendahara Pengeluaran :  
Pejabat Penanda Tangan SPM :

Halaman : I A. 2

Indikator Kinerja Kegiatan	021	Dilebarkannya jalan (Km)
	022	Panjang jalan yang ditingkatkan kapasitasnya
	023	Rehabilitasi Jalan (Km)
	036	Membangun Jembatan (m)
	039	Lahan yang Dibebaskan (Ha)
	040	Lahan yang Dibangun (Ha)
	053	Jalan yang Dibangun (m)
	055	Pelebaran Jalan KP. ASAM ASAM - KINTAB
	056	Preservasi dan Pelebaran Jalan (Km)
	058	Panjang jembatan yang dibangun
	059	Preservasi dan Pelebaran Jalan (Km)
	082	Akses Pelabuhan (Km)
	102	Panjang jembatan yang dibangun (m)
	139	Panjang fly over dibangun (m)
	140	Panjang fly over dibangun (m)
	141	Panjang Terowongan Dibangun (m)
	144	Panjang fly over dibangun (m)
	146	Panjang jalan bebas hambatan (Km)
	165	Panjang jalan yang meningkat kapasitasnya
	169	Pembangunan Fly Over/Underpass/Terowongan (m)
	171	Rekonstruksi Jalan (Km)
	174	Pemeliharaan Jalan (Km)
	179	Pelebaran Jalan (Km)
	182	Panjang jalan yang meningkat struktur jalannya (Km)
	185	Panjang jembatan dibangun (Km)
	192	Panjang jalan dibangun (Km)
	193	Panjang jalan yang terbangun saluran drainase (Km)
	199	Panjang jalan direhab (Km)
	200	Pembangunan Jalan

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Rencana Mutu Unit Kerja (RMU)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-60  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 30 September 2022  
Tgl. Kaji Ulang : September 2027

Hal : 18 dari 29  
Paraf :

### DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA - I A. INFORMASI KINERJA

Kementerian Negara/Lembaga :  
Unit Organisasi :  
Provinsi :  
Kode/Nama Satker :

Kuasa Pengguna Anggaran :  
Bendahara Pengeluaran :  
Pejabat Penanda Tangan SPM :

Halaman : I A. 3

Indikator Kinerja Kegiatan	205	Panjang Jalan dibangun (Km)		
	212	Panjang jalan dilebarkan (Km)		
	218	Panjang jembatan dibangun (m)		
	221	Panjang Jembatan diganti (m)		
	227	Panjang jalan ditingkatkan (Km)		
	233	Panjang jalan direkonstruksi		
	236	Panjang jalan direkonstruksi (Km)		
	239	Preservasi Jembatan (m)		
	240	Panjang jalan direkonstruksi (Km)		
	246	Preservasi Jalan		
	248	Panjang jalan yang meningkat kapasitasnya (Km)		
	253	Panjang jalan akses ke pelabuhan (Km)		
	254	Panjang jalan yang terbangun (Km)		
	257	Panjang Fly Over/Underpass/Terowongan yang di bangun (m)		
	261	Panjang jalan dipreservasi (Km)		
	262	Preservasi Jalan (Km)		
	263	Panjang Jalan dibangun (Km)		
	267	Panjang Jalan yang dipreservasi (Km)		
	268	Panjang jalan yang dibangun (Km)		
	270	Jalan yang Direhabilitasi (Km)		
	274	Pembangunan Jembatan (m)		
	278	Pembangunan Jalan (Km)		
	279	Jalan yang Direkonstruksi (Km)		
	280	Jalan yang Diperbaiki (Km)		
	285	Jalan yang Dibangun (Km)		
	286	Jalan yang Dilebarkan (Km)		
	287	Peningkatan Fisik Ruas Jalan (Km)		
Keluaran (Output)	2409.018	Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	12,00 Layanan	12.272.300.000

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Penyusunan Rencana Mutu Unit Kerja (RMU)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-60  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 30 September 2022  
Tgl. Kaji Ulang : September 2027

Hal : 19 dari 29  
Paraf :

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2017  
NOMOR : DIPA -  
I A. INFORMASI KINERJA

Kementerian Negara/Lembaga :  
Unit Organisasi :  
Provinsi :  
Kode/Nama Satker :

Kuasa Pengguna Anggaran :  
Bendahara Pengeluaran :  
Pejabat Penanda Tangan SPM :

Halaman : I A. 4

2409.951	Layanan Internal (Overhead)	12,00 Layanan	26.746.618.000
2409.994	Layanan Perkantoran	12,00 Bulan Layanan	51.161.627.000

a.n MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SEKRETARIS JENDERAL

Ttd.

.....

NIP.....

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Penyusunan Rencana Mutu Unit Kerja (RMU)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-60  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 30 September 2022  
Tgl. Kaji Ulang : September 2027

Hal : 20 dari 29  
Paraf :

Dari Contoh DIPA Petikan di atas Tabel Sasaran Pelaksanaan Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan Pada Tahun Anggaran (Berkenaan) dapat diisi sebagai berikut:

NO.	SASARAN	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	OUTCOME KEGIATAN
1.		Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional.	1. Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional. 2. Layanan Internal ( <i>Overhead</i> ). 3. Layanan Perkantoran.	1. Meningkatnya konektivitas jalan nasional. 2. Meningkatnya kemantapan jalan nasional.

Dari Contoh DIPA Petikan di atas Tabel Rincian Rencana Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan Pada Tahun Anggaran (Berkenaan) dapat diisi sebagai berikut:

NO.	OUTPUT KEGIATAN	VOLUME	BIAYA
1.	Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional.	12 Layanan	12.272.300
2.	Layanan Internal ( <i>Overhead</i> ).	12 Layanan	26.746.618
3.	Layanan Perkantoran.	12 Bulan Layanan	51.161.627

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Rencana Mutu Unit Kerja (RMU)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-60  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 30 September 2022  
Tgl. Kaji Ulang : September 2027

Hal : 21 dari 29  
Paraf :



## CONTOH PENGISIAN FORMAT

### DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A .....						
KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI						
KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN/DETIL	PERHITUNGAN TAHUN .....			SD/CP	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
207	PPK. .... <b>Koordinasi/Sinkronisasi/Kerjasama</b>					
A	<b>PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENINGKATAN KINERJA BERBASIS SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN SPIP</b>					
521211	<b>Belanja Bahan</b> (KPPN.139-JAKARTA V) -Biaya Lelang (ATK, Foto Copy, Penggandaan, Konsumsi, Snack, dll)	KEG			RM	
521213	<b>Honor Output Kegiatan</b> (KPPN.139-JAKARTA V) -Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa (pagu di atas Rp 1 miliar s.d. 2,5 miliar) (7 ORG) -Honorarium Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi) pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP			SBM	
522131	<b>Belanja Jasa Konsultan</b> (KPPN.139-JAKARTA V) -KONSULTAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENINGKATAN KINERJA BERBASIS SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN SPIP	OP			SBM	
		DOK			RM	
B	<b>PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN JALAN</b>					
521211	<b>Belanja Bahan</b> (KPPN.139-JAKARTA V) -Biaya Lelang (ATK, Foto Copy, Penggandaan, Konsumsi, Snack, dll)	KEG			RM	
521213	<b>Honor Output Kegiatan</b> (KPPN.139-JAKARTA V) -Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa (pagu di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 3 miliar) (7 ORG) -Honorarium Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi) pagu pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar (7 ORG x)	OP			SBM	
522131	<b>Belanja Jasa Konsultan</b> (KPPN.139-JAKARTA V) -KONSULTAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN JALAN	OP			SBM	
		DOK			RM	
C	<b>PENETAPAN KINERJA DAN PENYUSUNAN LAKIP</b>					
521211	<b>Belanja Bahan</b> (KPPN.139-JAKARTA V) -Bahan Operasional Kegiatan -Konsumsi (20 ORG x 2 HR x 1 KL x 1 LOK) -Snack (20 ORG x 2 HR x 1 KL x 1 LOK) Foto Copy / Penggandaan Bahan Operasional Komputer (9 BLN)	BLN ORG ORG LBR BLN			RM	
521213	<b>Honor Output Kegiatan</b> (KPPN.139-JAKARTA V) -Honor Penyuluh Non PNS (Sarjana)	OB			SBM	
D	<b>PENYIAPAN DATA INFORMASI DAN EVALUASI JALUR LEBARAN DAN NATAL</b>					
521211	<b>Belanja Bahan</b> (KPPN.139-JAKARTA V) -Bahan Operasional Komputer ( 3 BLN) -Biaya Foto Copy, Penggandaan Bahan, dll (30 ORG x 6 LOK) -Konsumsi (30 ORG x 2 HR x 2 KL x 6 LOK) -Snack (30 ORG x 2 HR x 2 KL x 6 LOK) -Bahan Operasional Kegiatan	BLN ORG ORG ORG BLN			RM	
522131	<b>Belanja Jasa Konsultan</b> (KPPN.139-JAKARTA V) -Ahli Transportasi (1 ORG x 3 BLN) -Ahli Jalan Raya (1 ORG x 3 BLN) -Asisten Ahli (2 ORG x 3 BLN)	OB OB OB			RM	
522141	<b>Belanja Sewa</b> (KPPN.139-JAKARTA V) -Sewa Kendaraan Roda 4 (D.K.I. JAKARTA)	HR			RM	
522151	<b>Belanja Jasa Profesi</b> (KPPN.139-JAKARTA V) > FASILITASI JALAN DAN JEMBATAN -Honor Narasumber/Pembahas (Pakar/Praktis/Profesional) -Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) -Honorarium Moderator	OJ OJ OK			SBM SBM SBM	
524111	<b>Belanja Perjalanan Biasa</b> (KPPN.139-JAKARTA V) > SURABAYA -Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - SURABAYA Timur (2 ORG x 1 TRIP) (2 ORG x 2 HR x 1 TRIP) -Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (JAWA TIMUR) (2 ORG x 1 HR x 1 TRIP) -Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) (2 ORG x 2 KALI x 1 TRIP) -Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Jawa Timur) (2 ORG x 2 KALI x 1 TRIP) > BANDUNG -Satuan Biaya Perjalanan Dinas Jakarta - Bandung (PP) (2 ORG x 1 TRIP) -Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat) -Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (JAWA BARAT) > SEMARANG -Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - SEMARANG -Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah) -Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (JAWA TENGAH) -Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) -Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Jawa Tengah)	OK OH OKAL OKAL OK OH OH OK OH OH OKAL OKAL			SBM SBM SBM SBM SBM SBM SBM SBM SBM SBM SBM SBM	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Rencana Mutu Unit Kerja (RMU)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-60  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 30 September 2022  
Tgl. Kaji Ulang : September 2027

Hal : 22 dari 29  
Paraf :

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN/DETIL	PERHITUNGAN TAHUN .....			SD/CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
401 A 521211 52131 52141 524111	> LAMPUNG -Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - BANDAR LAMPUNG -Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Lampung) -Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (LAMPUNG) -Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) -Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Lampung)	OK OH OH ORKAL OK			SBM SBM SBM SBM SBM
	> BANJARMASIN -Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - BANJARMASIN -Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Kalimantan Selatan) -Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (KALIMANTAN SELATAN) -Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) -Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Kalimantan Selatan)	OK OH OH ORKAL ORKAL			SBM SBM SBM SBM SBM
	> SULAWESI SELATAN -Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MAKASSAR -Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sulawesi Selatan) -Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (SULAWESI SELATAN) -Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) -Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Sulawesi Selatan)	OK OH OH ORKAL OK			SBM SBM SBM SBM SBM
	> DI YOGYAKARTA -Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - Jogjakarta -Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.I. Yogyakarta) -Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (D.I. YOGYAKARTA) -Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) -Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta)	OK OH OH ORKAL ORKAL			SBM SBM SBM SBM SBM
	> BANTEN -Tiket Jakarta - Banten (PP) (2 ORG x 2 TRIP) -Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Banten) -Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (BANTEN)	OK OH OH			SBM SBM SBM
	> SUMATERA UTARA -Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MEDAN -Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara) -Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (SUMATERA UTARA) -Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) -Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Sumatera Utara)	OK OH OH ORKAL OK			SBM SBM SBM SBM SBM
	<b>401 Monitoring dan Evaluasi</b>				U
	<b>A REKOMENDASI, EVALUASI DAN PENETAPAN LAIK FUNGSI JALAN</b>				
	<b>521211 Belanja Bahan</b>				
	(KPPN.139-JAKARTA V) -Bahan ATK -Bahan Komputer -Makan Rapat Biasa D.K.I Jakarta (15 ORG x 7 KALI) -Snack Rapat Biasa D.K.I Jakarta (15 ORG x 7 KALI)	BLN BLN OK OK			SBM SBM RM
	<b>52131 Belanja Jasa Konsultan</b>				
	(KPPN.139-JAKARTA V) -Jasa Tenaga Ahli (1 ORG x 6 BLN)	OB			RM
	<b>52141 Belanja Sewa</b>				
	(KPPN.139-JAKARTA V) -Sewa Kendaraan Roda 4 (1 UNIT x 2 HR x 7 LOK)	HARI			RM
	<b>524111 Belanja Perjalanan Biasa</b>				
	(KPPN.139-JAKARTA V) > KALIMANTAN SELATAN -Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - BANJARMASIN (2 ORG x 1 TRIP) -Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Kalimantan Selatan) (2 ORG x 3 HR x 1 TRIP) -Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (KALIMANTAN SELATAN) (2 ORG x 2 HR x 1 TRIP) -Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) (2 ORG x 2 KALI x 1 TRIP) -Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Kalimantan Selatan) (2 ORG x 2 KALI x 1 TRIP)	OK OH OH ORKAL ORKAL			SBM SBM SBM SBM SBM
	> SUMATERA UTARA -Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MEDAN (2 ORG x 1 TRIP) -Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara) (2 ORG x 3 HR x 1 TRIP) -Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (SUMATERA UTARA) (2 ORG x 2 HR x 1 TRIP) -Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) (2 ORG x 2 KALI x 1 TRIP) -Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Sumatera Utara) (2 ORG x 2 KALI x 1 TRIP)	OK OH OH ORKAL ORKAL			SBM SBM SBM SBM SBM
	> GORONTALO -Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - GORONTALO (2 ORG x 1 TRIP) -Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Gorontalo) (2 ORG x 3 HR x 1 TRIP) -Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (GORONTALO) (2 ORG x 2 HR x 1 TRIP) -Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) (2 ORG x 2 KALI x 1 TRIP) -Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Gorontalo) (2 ORG x 2 KALI x 1 TRIP)	OK OH OH ORKAL ORKAL			SBM SBM SBM SBM SBM
	> SULAWESI TENGGARA -Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - KENDARI (2 ORG x 1 TRIP) -Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sulawesi Tenggara) (2 ORG x 3 HR x 1 TRIP) -Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (SULAWESI TENGGARA) (2 ORG x 2 HR x 1 TRIP) -Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) (2 ORG x 2 KALI x 1 TRIP) -Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Sulawesi Tenggara) (2 ORG x 2 KALI x 1 TRIP)	OK OH OH ORKAL ORKAL			SBM SBM SBM SBM SBM
	> MALUKU -Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - AMBON (2 ORG x 1 TRIP) -Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Maluku) (2 ORG x 3 HR x 1 TRIP) -Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (MALUKU) (2 ORG x 2 HR x 1 TRIP) -Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) (2 ORG x 2 KALI x 1 TRIP) -Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Maluku) (2 ORG x 2 KALI x 1 TRIP)	OK OH OH ORKAL ORKAL			SBM SBM SBM SBM SBM

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Rencana Mutu Unit Kerja (RMU)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-60  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 30 September 2022  
Tgl. Kaji Ulang : September 2027

Hal : 23 dari 29  
Paraf :

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN/DETIL	PERHITUNGAN TAHUN .....			SD/CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B	PAPUA				
	-Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JAYAPURA (2 ORG x 1 TRIP)	OK			SBM
	-Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Papua) (2 ORG x 3 HR x 1 TRIP)	OH			SBM
		OH			SBM
	-Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (PAPUA) (2 ORG x 2 HR x 1 TRIP)	OR			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) (2 ORG x 2 KALI x 1 TRIP)	OR			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Papua) (2 ORG x 2 KALI x 1 TRIP)	OR			SBM
	MONEV PEMBANGUNAN JALAN				
	521211 Belanja Bahan (KPPN.139-JAKARTA V)				RM
	-Bahan Operasional Kegiatan	BLN			
522131	-Bahan Operasional Komputer	BLN			
	-Konsumsi (20 ORG x 2 HR x 2 KL x 3 LOK)	ORG			
	-Snack (20 ORG x 2 HR x 2 KL x 3 LOK)	ORG			
	-Foto Copy / Penggandaan	LBR			
	-Cetak Formulir Gambar	LBR			
	522131 Belanja Jasa Konsultansi (KPPN.139-JAKARTA V)				RM
	-Jasa Tenaga Ahli (2 ORG x 8 BLN)	OB			
	522141 Belanja Sewa (KPPN.139-JAKARTA V)				RM
	-Sewa Kendaraan Roda 4 (2 UNIT x 2 HR x 9 LOK)	HARI			
	522151 Belanja Jasa Profesi (KPPN.139-JAKARTA V)				RM
524111	> FASILITASI JALAN DAN JEMBATAN				
	-Honor Narasumber/Pembahas (Pakar/Praktisi/Profesional) (2 ORG x 2 JAM x 2 HR x 9 LOK)	OJ			SBM
	-Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat) (2 ORG x 3 JAM x 2 HR x 9 LOK)	OJ			SBM
	-Honorarium Moderator (1 ORG x 3 KALI x 2 HR x 9 LOK)	OK			SBM
	524111 Belanja Perjalanan Biasa (KPPN.139-JAKARTA V)				RM
	> BANTEN				
	-Tiket Jakarta - Banten (PP) (2 ORG x 1 TRIP)	OK			SBM
	-Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Banten) (2 ORG x 3 HR x 1 TRIP)	OH			SBM
		OH			SBM
	-Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (BANTEN) (2 ORG x 2 HR x 1 TRIP)	OR			SBM
DKI JAKARTA	> DKI JAKARTA				
	-Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (D.K.I Jakarta) (2 ORG x 3 HR x 1 TRIP)	OH			SBM
	> JAWA BARAT				
	-Tiket Jakarta - Bandung (PP) (3 ORG x 1 TRIP)	OK			SBM
	-Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat) (3 ORG x 3 HR x 1 TRIP)	OH			SBM
	-Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (JAWA BARAT) (3 ORG x 2 HR x 1 TRIP)	OR			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Jawa Barat) (3 ORG x 1 TRIP)	OR			SBM
	> JAWA TIMUR				
	-Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - SURABAYA (2 ORG x 2 TRIP)	OK			SBM
	-Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Timur) (2 ORG x 3 HR x 2 TRIP)	OH			SBM
DI YOGYAKARTA	-Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (SUMATERA UTARA) (2 ORG x 2 HR x 2 TRIP)	OR			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) (2 ORG x 2 KALI x 2 TRIP)	OR			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Jawa Timur) (2 ORG x 2 KALI x 2 TRIP)	OR			SBM
	> DI YOGYAKARTA				
	-Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA	OK			SBM
	-Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.I Yogyakarta)	OH			SBM
	-Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (D.I YOGYAKARTA)	OR			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta)	OR			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta)	OR			SBM
	> JAWA TENGAH				
JAWA TENGAH	-Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - SEMARANG	OK			SBM
	-Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah)	OH			SBM
	-Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (JAWA TENGAH)	OR			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta)	OR			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Jawa Tengah)	OR			SBM
	> NTB				
	-Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MATARAM	OK			SBM
	-Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Nusa Tenggara Barat)	OH			SBM
	-Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (NUSA TENGGARA BARAT)	OR			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta)	OR			SBM
BALI	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Nusa Tenggara Barat)	OR			SBM
	> BALI				
	-Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - DENPASAR	OK			SBM
	-Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Bali)	OH			SBM
	-Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (BALI)	OR			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta)	OR			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Bali)	OR			SBM
	> NTT				
	-Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - KUPANG	OK			SBM
	-Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Nusa Tenggara Timur)	OH			SBM
KALIMANTAN BARAT	-Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (NUSA TENGGARA TIMUR)	OR			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta)	OR			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Nusa Tenggara Timur)	OR			SBM
	> KALIMANTAN BARAT				
	-Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - PONTIANAK	OK			SBM
	-Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Kalimantan Barat)	OH			SBM
	-Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (KALIMANTAN BARAT)	OR			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta)	OR			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Kalimantan Barat)	OR			SBM

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Rencana Mutu Unit Kerja (RMU)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-60  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 30 September 2022  
Tgl. Kaji Ulang : September 2027

Hal : 24 dari 29  
Paraf :

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN/DETIL	PERHITUNGAN TAHUN .....			SD/CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
>	KALIMANTAN TENGAH	OK			SBM
	-Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - PALANGKARAYA	OH			SBM
>	-Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Kalimantan Tengah)	OH			SBM
	-Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (KALIMANTAN TENGAH)	OR			SBM
>	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta)	OR			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Kalimantan Tengah)	OR			SBM
>	KALIMANTAN SELATAN	OK			SBM
	-Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - BANJARMASIN	OH			SBM
>	-Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Kalimantan Selatan)	OH			SBM
	-Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (KALIMANTAN SELATAN)	OR			SBM
>	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta)	OR			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Kalimantan Selatan)	OR			SBM
>	KALIMANTAN TIMUR	OK			SBM
	-Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - BALIKPAPAN (2 ORG x 2 TRIP)	OH			SBM
>	-Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Kalimantan Timur) (2 ORG x 3 HR x 2 TRIP)	OH			SBM
	-Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (KALIMANTAN TIMUR) (2 ORG x 2 HR x 2 TRIP)	OR			SBM
>	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) (2 ORG x 2 KALI x 2 TRIP)	OR			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Kalimantan Timur) (2 ORG x 2 KALI x 2 TRIP)	OR			SBM
>	ACEH	OK			SBM
	-Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - BANDA ACEH	OH			SBM
>	-Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Aceh)	OH			SBM
	-Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (ACEH)	OR			SBM
>	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta)	OR			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Aceh)	OR			SBM
>	SUMATERA UTARA	OK			SBM
	-Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MEDAN (2 ORG x 2 TRIP)	OH			SBM
>	-Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara) (2 ORG x 3 HR x 2 TRIP)	OH			SBM
	-Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (SUMATERA UTARA) (2 ORG x 2 HR x 2 TRIP)	OR			SBM
>	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) (2 ORG x 2 KALI x 2 TRIP)	OR			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Sumatera Utara) (2 ORG x 2 KALI x 2 TRIP)	OR			SBM
>	BENGKULU	OK			SBM
	-Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - BENGKULU	OH			SBM
>	-Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Bengkulu)	OH			SBM
	-Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (BENGKULU)	OR			SBM
>	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta)	OR			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Bengkulu)	OR			SBM
>	LAMPUNG	OK			SBM
	-Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - BANDAR LAMPUNG	OH			SBM
>	-Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Lampung)	OH			SBM
	-Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (LAMPUNG)	OR			SBM
>	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta)	OR			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Lampung)	OR			SBM
>	RIAU	OK			SBM
	-Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - PEKANBARU	OH			SBM
>	-Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Riau)	OH			SBM
	-Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (RIAU)	OR			SBM
>	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta)	OR			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Riau)	OR			SBM
>	SUMATERA BARAT	OK			SBM
	-Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - PADANG (2 ORG x 2 TRIP)	OH			SBM
>	-Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Barat) (2 ORG x 3 HR x 2 TRIP)	OH			SBM
	-Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (SUMATERA BARAT) (2 ORG x 2 HR x 2 TRIP)	OR			SBM
>	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) (2 ORG x 2 KALI x 2 TRIP)	OR			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Sumatera Barat) (2 ORG x 2 KALI x 2 TRIP)	OR			SBM
>	SUMATERA SELATAN	OK			SBM
	-Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - PALEMBANG	OH			SBM
>	-Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Selatan)	OH			SBM
	-Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (SUMATERA SELATAN)	OR			SBM
>	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta)	OR			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Sumatera Selatan)	OR			SBM
>	KEP. RIAU	OK			SBM
	-Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - BATAM	OH			SBM
>	-Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Kepulauan Riau)	OH			SBM
	-Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (KEPULAUAN RIAU)	OR			SBM
>	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta)	OR			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Kepulauan Riau)	OR			SBM
>	SULAWESI UTARA	OK			SBM
	-Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MANADO	OH			SBM
>	-Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sulawesi Utara)	OH			SBM
	-Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (SULAWESI UTARA)	OR			SBM
>	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta)	OR			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Sulawesi Utara)	OR			SBM

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Rencana Mutu Unit Kerja (RMU)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-60  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 30 September 2022  
Tgl. Kaji Ulang : September 2027

Hal : 25 dari 29  
Paraf :

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN/DETIL	PERHITUNGAN TAHUN .....			SD/CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	> GORONTALO				
	-Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - GORONTALO	OK			SBM
	-Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Gorontalo)	OH			SBM
	-Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (GORONTALO)	OH			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta)	ORKAL			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Gorontalo)	ORKAL			SBM
	> SULAWESI BARAT				
	-Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MAMUJU	OK			SBM
	-Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sulawesi Barat)	OH			SBM
	-Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (SULAWESI BARAT)	OH			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta)	ORKAL			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Sulawesi Barat)	ORKAL			SBM
	> SULAWESI SELATAN				
	-Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MAKASSAR	OK			SBM
	-Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sulawesi Selatan)	OH			SBM
	-Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (SULAWESI SELATAN)	OH			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta)	ORKAL			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Sulawesi Selatan)	ORKAL			SBM
	> SULAWESI TENGAH				
	-Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - PALU	OK			SBM
	-Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sulawesi Tengah)	OH			SBM
	-Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (SULAWESI TENGAH)	OH			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta)	ORKAL			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Sulawesi Tengah)	ORKAL			SBM
	> SULAWESI TENGGARA				
	-Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - KENDARI	OK			SBM
	-Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sulawesi Tenggara)	OH			SBM
	-Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (SULAWESI TENGGARA)	OH			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta)	ORKAL			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Sulawesi Tenggara)	ORKAL			SBM
	> MALUKU				
	-Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - AMBON	OK			SBM
	-Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Maluku)	OH			SBM
	-Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (MALUKU)	OH			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta)	ORKAL			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Maluku)	ORKAL			SBM
	> MALUKU UTARA				
	-Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - AMBON	OK			SBM
	-Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Maluku Utara)	OH			SBM
	-Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (MALUKU UTARA)	OH			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta)	ORKAL			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Maluku Utara)	ORKAL			SBM
	> PAPUA				
	-Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JAYAPURA	OK			SBM
	-Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Papua)	OH			SBM
	-Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (PAPUA)	OH			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta)	ORKAL			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Papua)	ORKAL			SBM
	> PAPUA BARAT				
	-Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MANOKWARI (4 ORG x 1 TRIP)	OK			SBM
	-Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Papua Barat) (4 ORG x 3 HR x 1 TRIP)	OH			SBM
	-Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (PAPUA BARAT) (4 ORG x 2 HR x 1 TRIP)	OH			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) (4 ORG x 2 KALI x 1 TRIP)	ORKAL			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Papua Barat) (4 ORG x 2 KALI x 1 TRIP)	ORKAL			SBM
C	PENILAIAN KEPATUHAN PELAKSANAAN SMM, SMK3, DAN DOKUMEN LINGKUNGAN				
521211	Belanja Bahan (KPPN.139-JAKARTA V)				RM
	-Bahan Operasional Kegiatan	BLN			
	-Bahan Operasional Komputer	BLN			
	-Konsumsi (20 ORG x 2 HR x 2 KL x 3 LOK)	ORG			
	-Snack (20 ORG x 2 HR x 2 KL x 3 LOK)	ORG			
	-Foto Copy / Penggandaan	LBR			
	-Cetak Formulir Gambar	LBR			
521213	Honor Output Kegiatan (KPPN.139-JAKARTA V)				RM
	-Honorarium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK KPA) (2 ORG x 8 BLN)	OB			SBM
	-Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK KPA) (1 ORG x 8 BLN)	OB			SBM
	-Honorarium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK KPA) (1 ORG x 8 BLN)	OB			SBM
	-Honorarium Penanggung Jawab Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK KPA) (1 ORG x 8 BLN)	OB			SBM
522131	Belanja Jasa Konsultan (KPPN.139-JAKARTA V)				RM
	-Jasa Tenaga Ahli (1 ORG x 8 BLN)	OB			
522141	Belanja Sewa (KPPN.139-JAKARTA V)				RM
	-Sewa Kendaraan Roda 4 (2 UNIT x 2 HR x 3 LOK)	HARI			
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.139-JAKARTA V)				RM
	> FASILITASI JALAN DAN JEMBATAN				
	-Honor Narasumber/Pembahas (Pakar/Praktisi/Profesional) (1 ORG x 2 JAM x 2 HR x 5 LOK)	OJ			SBM

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Penyusunan Rencana Mutu Unit Kerja (RMU)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-60  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 30 September 2022  
Tgl. Kaji Ulang : September 2027

Hal : 26 dari 29  
Paraf :

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN/DETIL	PERHITUNGAN TAHUN .....			SD/CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	-Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat) (1 ORG x 4 JAM x 5 HR x 9 LOK)	OJ			SBM
	Belanja Perjalanan Biasa				RM
	(KPPN.139-JAKARTA V)				
	> -Tiket Jakarta - Bandung (PP) (2 ORG x 1 TRIP)	OK			SBM
	-Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat) (2 ORG x 3 HR x 1 TRIP)	OH			SBM
	-Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (JAWA BARAT) (2 ORG x 2 HR x 1 TRIP)	OH			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Jawa Barat) (2 ORG x 1 TRIP)	ORKAL			SBM
	> DI YOGYAKARTA				
	-Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA (2 ORG x 1 TRIP)	OK			SBM
	-Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.I Yogyakarta) (2 ORG x 3 HR x 1 TRIP)	OH			SBM
	-Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (D.I YOGYAKARTA) (2 ORG x 2 HR x 1 TRIP)	OH			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) (2 ORG x 2 KALI x 1 TRIP)	ORKAL			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) (2 ORG x 2 KALI x 1 TRIP)	ORKAL			SBM
	> NTT				
	-Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - KUPANG (2 ORG x 1 TRIP)	OK			SBM
	-Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Nusa Tenggara Timur) (2 ORG x 3 HR x 1 TRIP)	OH			SBM
	-Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (NUSA TENGGARA TIMUR) (2 ORG x 2 HR x 1 TRIP)	OH			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) (2 ORG x 2 KALI x 1 TRIP)	ORKAL			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Nusa Tenggara Timur) (2 ORG x 2 KALI x 1 TRIP)	ORKAL			SBM
	> KALIMANTAN TIMUR				
	-Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - BALIKPAPAN (2 ORG x 1 TRIP)	OK			SBM
	-Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Kalimantan Timur) (2 ORG x 3 HR x 1 TRIP)	OH			SBM
	-Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (KALIMANTAN TIMUR) (2 ORG x 2 HR x 1 TRIP)	OH			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) (2 ORG x 2 KALI x 1 TRIP)	ORKAL			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Kalimantan Timur) (2 ORG x 2 KALI x 1 TRIP)	ORKAL			SBM
	> SUMATERA UTARA				
	-Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MEDAN (2 ORG x 1 TRIP)	OK			SBM
	-Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara) (2 ORG x 3 HR x 1 TRIP)	OH			SBM
	-Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (SUMATERA UTARA) (2 ORG x 2 HR x 1 TRIP)	OH			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) (2 ORG x 2 KALI x 1 TRIP)	ORKAL			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Sumatera Utara) (2 ORG x 2 KALI x 1 TRIP)	OK			SBM
	> LAMPUNG				
	-Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - BANDAR LAMPUNG (2 ORG x 1 TRIP)	OK			SBM
	-Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Lampung) (2 ORG x 3 HR x 1 TRIP)	OH			SBM
	-Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (LAMPUNG) (2 ORG x 2 HR x 1 TRIP)	OH			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) (2 ORG x 2 KALI x 1 TRIP)	ORKAL			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Lampung) (2 ORG x 2 KALI x 1 TRIP)	OK			SBM
	> SUMATERA BARAT				
	-Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - PADANG (2 ORG x 1 TRIP)	OK			SBM
	-Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Barat) (2 ORG x 3 HR x 1 TRIP)	OH			SBM
	-Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (SUMATERA BARAT) (2 ORG x 2 HR x 1 TRIP)	OH			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) (2 ORG x 2 KALI x 1 TRIP)	ORKAL			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Sumatera Barat) (2 ORG x 2 KALI x 1 TRIP)	OK			SBM
	> SULAWESI UTARA				
	-Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MANADO (2 ORG x 1 TRIP)	OK			SBM
	-Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sulawesi Utara) (2 ORG x 3 HR x 1 TRIP)	OH			SBM
	-Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (SULAWESI UTARA) (2 ORG x 2 HR x 1 TRIP)	OH			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) (2 ORG x 2 KALI x 1 TRIP)	ORKAL			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Sulawesi Utara) (2 ORG x 2 KALI x 1 TRIP)	OK			SBM
	> SULAWESI SELATAN				
	-Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MAKASSAR (2 ORG x 1 TRIP)	OK			SBM
	-Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sulawesi Selatan) (2 ORG x 3 HR x 1 TRIP)	OH			SBM
	-Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (SULAWESI SELATAN) (2 ORG x 2 HR x 1 TRIP)	OH			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) (2 ORG x 2 KALI x 1 TRIP)	ORKAL			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Sulawesi Selatan) (2 ORG x 2 KALI x 1 TRIP)	OK			SBM
	> MALUKU UTARA				
	-Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - AMBON (3 ORG x 1 TRIP)	OK			SBM
	-Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Maluku Utara) (3 ORG x 3 HR x 1 TRIP)	OH			SBM
	-Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (MALUKU UTARA) (3 ORG x 2 HR x 1 TRIP)	OH			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) (3 ORG x 2 KALI x 1 TRIP)	ORKAL			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Maluku Utara) (3 ORG x 2 KALI x 1 TRIP)	OK			SBM
	> PAPUA BARAT				
	-Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MANOKWARI (3 ORG x 1 TRIP)	OK			SBM
	-Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Papua Barat) (3 ORG x 3 HR x 1 TRIP)	OH			SBM
	-Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (PAPUA BARAT) (3 ORG x 2 HR x 1 TRIP)	OH			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) (3 ORG x 2 KALI x 1 TRIP)	ORKAL			SBM
	-Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Papua Barat) (3 ORG x 2 KALI x 1 TRIP)	OK			SBM
2405, 201	Pelaporan secara Elektronik (e-monitoring)				
	[Base Line]				
	Lokasi: KOTA JAKARTA SELATAN	Dok			

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Penyusunan Rencana Mutu Unit Kerja (RMU)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-60  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 30 September 2022  
Tgl. Kaji Ulang : September 2027

Hal : 27 dari 29  
Paraf :



### CONTOH PENGISIAN FORMAT DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

Dari Contoh Rincian Kertas Kerja Satker di atas Tabel Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Yang Akan Diselenggarakan Pada Tahun Anggaran (Berkenaan) dapat diisi sebagai berikut:

No.	NAMA KEGIATAN	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	TAHUN ....., BULAN KE :											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	.....													
2.	.....													
3.	A. Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan dan Peningkatan Kinerja Berbasis Sistem Manajemen Mutu dan SPIP.	PPK .....												
	B. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Jalan.	PPK .....												
	C. Penetapan Kinerja dan Penyusunan LAKIP.	PPK .....												
	D. Penyiapan Data Informasi dan Evaluasi Jalur Lebaran dan Natal.	PPK .....												

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Penyusunan Rencana Mutu Unit Kerja (RMU)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-60  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 30 September 2022  
Tgl. Kaji Ulang : September 2027

Hal : 28 dari 29  
Paraf :

No.	NAMA KEGIATAN	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	TAHUN ....., BULAN KE :											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	A. Rekomendasi, Evaluasi dan Penetapan Laik Fungsi Jalan.	PPK .....												
	B. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Jalan.	PPK .....												
	C. Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan SMM, SMK3 dan Dokumen.	PPK .....												
5.	.....													

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Penyusunan Rencana Mutu Unit Kerja (RMU)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-60  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 30 September 2022  
Tgl. Kaji Ulang : September 2027

Hal : 29 dari 29  
Paraf :

#### Daftar Simak Rencana Mutu Unit

(FRM-07/SOP/UPM/DJBM-60 Rev:01)

KOP INSTASI

No	Uraian	Hasil Pemeriksaan		Catatan
		Ya	Tidak	
1.	Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) lengkap, sesuai.			
2.	Dokumen penetapan kerja lengkap dan divalidasi, sesuai.			
3.	Dokumen sasaran pelaksanaan kegiatan lengkap, sesuai.			
4.	Dokumen rincian rencana kegiatan lengkap, sesuai.			
5.	Dokumen jadwal pelaksanaan kegiatan lengkap, sesuai.			
6.	Diadakan rapat pembahasan hasil penyusunan <i>draft</i> RMU.			
7.	Berita Acara hasil pembahasan <i>draft</i> RMU dan divalidasi, sesuai.			
8.	Dokumen RMU lengkap dan divalidasi, sesuai.			

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*